



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
TAHUN 2019**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe telah tersusun dengan baik.

LKj IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe merupakan hasil penilaian obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2019. LKj IP ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe pada masa yang akan datang.

Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dimasa yang akan datang, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Februari 2020

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEPALA PELAKSANA**

NOFENDI, S.Sos
Nip. 19681123 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi.....	2
1.4. Sistematika Penyusunan.....	5
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Realisasi Anggaran	16
BAB IV – PENUTUP	18
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prasyarat bagi setiap pemerintahan adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kota Lhokseumawe yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2019.

BPBD merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BPBD memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BPBD yakni berupa tindakan

kebencanaan yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan aspek keuangan yang menggambarkan anggaran daerah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh yang terkandung dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022.

1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok pemerintah Kota Lhokseumawe.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- e. Pengkoordinasian pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan petugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Peanggulangan Bencana daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari:

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Umum;
 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik, terdiri dari:
 1. Seksi Kedaruratan, dan
 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe didukung dengan keberadaan pegawai sejumlah 152 (Seratus lima puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	31
2	Non PNS / Tenaga Magang	121
Jumlah		152

Berdasarkan jenjang pendidikan, kombinasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	4
2	Strata 1	17
3	SLTA	9
4	SMP	1
Jumlah		31

Berdasarkan tingkat kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan, Golongan dan Ruang

No	Tingkat Kepangkatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda IV/c	1
2	Pembina Tingkat I IV/b	2
3	Pembina IV/a	4
4	Penata Tk.I III/d	4
5	Penata III/c	6
6	Penata Muda Tk. I III/b	3

7	Penata Muda III/a	5
8	Pengatur Tk.I II/d	1
9	Pengatur II/c	1
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
11	Pengatur Muda, II/a	1
12	Juru I/c	1
Jumlah		31

Berdasarkan tingkat diklat aparatur, pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Tingkat Keikutsertaan diklat Aparatur

No	Tingkat Diklat Aparatur	Jumlah
1	Diklatpim III / Sederajat	3
2	Diklatpim IV / Sederajat	5
Jumlah		8

1.4 Sistematika Penyusunan

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj IP BPBD Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Renstra
2. IKU
3. Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan kinerja yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Tabel.2.1 Keterkaitan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi RPJM Kota Lhokseumawe	Tujuan RPJM Kota Lhokseumawe	Sasaran RPJM Kota Lhokseumawe	Tujuan Renstra BPBD	Sasaran Renstra BPBD
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>)	1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Kewaspadaan Bencana Secara Menyeluruh Dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 2.2 Anggaran Per Program Kegiatan Tahun Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.398.754.188
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.023.397
-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128.024.070
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.886.466
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.596.750
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000
-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	145.700.000
-	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.865.833.505
2	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR	402.130.600
-	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	39.910.000
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	33.300.000
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	256.000.000
-	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.920.600
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	184.063.800
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	184.063.800
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0
-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0
5	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	1.200.000

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kota
Lhokseumawe Tahun 2019**

	-	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	1.200.000
6		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	8.375.498.072
	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	78.635.610
	-	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	35.000.000
	-	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.364.390
	-	Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran	25.000.000

Secara detail mengenai penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dapat dilihat pada halaman lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dan realisasinya. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang buruk.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana atau target. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu Bulan Januari - Desember 2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi/Penetapan kinerja.

a) Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan Badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kota Lhokseumawe, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan BPBD. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Pengukuran Kinerja tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja utama di Tahun 2019, dengan target dari indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi di Tahun 2019	Capaian (%)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kewaspadaan bencana secara menyeluruh dengan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	18,39%	18,39%	100 %
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%

b) Target dan Realisasi belanja per Program/Kegiatan Tahun 2019

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target tahun 2019 materai untuk dapat dipergunakan selama 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%). Jika dibandingkan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, target tahun 2019 untuk dapat dipergunakan selama 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, target tahun 2019 tersedia untuk 240 OB, realisasi tercapai 240 OB (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, target tahun 2019 ATK tersedia untuk 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target tahun 2019 tersedia untuk 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target tahun 2019 tersedia untuk 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target tahun 2019 Surat Kabar tersedia 365 eks , realisasi surat kabar tercapai 365 eks (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, target tahun 2019 tersedia untuk 11 bulan, realisasi tercapai 11 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah, target tahun 2019 tersedia untuk 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap, target tahun 2019 tersedia untuk 1.356 OB, realisasi tercapai 1.356 OB (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target tahun 2019 tersedia untuk 5 jenis barang, realisasi tercapai 5 jenis barang (100 %), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi sebesar 75%, maka capaian kinerja tahun 2019 naik sebanyak 25 %.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, target tahun 2019 tersedia untuk 2 unit gedung , realisasi tercapai 2 unit gedung (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, target tahun 2019 tersedia untuk 12 UB, realisasi tercapai 12 UB (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, target tahun 2019 tersedia untuk 108 UB, realisasi tercapai 108 UB (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target tahun 2019 tersedia untuk 16 unit, realisasi tercapai 16 unit (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi sebesar 100 %, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, target tahun 2019 tersedia untuk pasang , realisasi tercapai pasang (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat pertahankan 100%.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, target tahun 2019 tersedia untuk 20 orang, namun kegiatan ini dibatalkan karena dialihkan untuk kegiatan lain.

V. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja.

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, target tahun 2019 tersedia 10 buku Renja, realisasi tercapai 10 buku Renja (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.

VI. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, target tahun 2019 tersedia 12 bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
2. Kegiatan Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana, target tahun 2019 tersedia untuk 12 Bulan, realisasi tercapai 12 bulan (100%), Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi juga sebesar 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100%.
3. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, target tahun 2019 tersedia untuk 1 paket, realisasi tercapai 100 %, Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana realisasi 100%, maka capaian kinerja tahun 2019 tidak ada atau nihil disebabkan belum adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disetujui oleh BNPB.
4. Kegiatan Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran, target tahun 2019 tersedia untuk 98 orang, namun kegiatan ini gagal dilaksanakan karena ketidaksiapan panitia penyelenggara dalam melakukan kegiatan ini.

Dari pembahasan diatas diketahui bahwa tingkat pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) sasaran mencapai 100% , setelah membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2018 juga mencapai 100%. Maka, dapat disimpulkan capaian kinerja tahun 2019 dapat dipertahankan 100% .

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Akuntabilitas Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.398.148.588	2.196.859.837	91,58
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000	2.460.000	96,47
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.023.397	88.800.039	41,69
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128.024.070	125.914.068	98,35
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.886.466	23.297.316	97,53
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	8.428.000	93,64
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.596.750	4.585.612	99,76
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000	1.140.000	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000	0	00,00
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	145.700.000	139.658.900	95,85
	- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.865.833.505	1.802.575.902	96,61
2	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR	402.130.600	332.881.200	82,78
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000	33.890.000	99,68
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	39.910.000	26.392.000	66,13
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	33.300.000	32.924.500	98,87
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	256.000.000	211.569.700	82,64
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.920.600	28.105.000	72,21
3	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR	184.063.800	175.423.800	95,31
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	184.063.800	175.423.800	95,31
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-
5	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	1.200.000	1.189.800	99,15
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.189.800	99,15

6	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	8.333.678.072	8.106.839.393	97,28
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	78.835.610	66.800.000	97,67
-	Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana	35.000.000	18.837.300	53,82
-	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1.364.390	0	00
-	Pelatihan dan Pembekalan Teknis Pemadam Kebakaran	25.000.000	0	00
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.383.843.999	2.281.456.626	95,70
TOTAL BELANJA LANGSUNG		3.126.148.588	2.801.991.937	89,63
TOTAL BELANJA		5.509.992.587	5.083.448.563	92,26

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 adalah 92,26 % (Rp. 5.083.448.563,- dari Total Anggaran Rp. 5.509.992.587,-), ini menunjukkan tingkat capaian serapan anggaran sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 94,60% (Rp. 12.688.720.189,- dari Total Anggaran Rp. 13.602.751.835,-), ini menunjukkan realisasi anggaran tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,34%.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun masih ada kekurangan. Namun demikian sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 telah mencapai sasaran target.

Secara singkat bahwa seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPBD untuk terus meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Oleh sebab itu sesuai dengan capaian kinerja Tahun 2019 ini BPBD Kota Lhokseumawe merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan terus dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan capaian kinerja Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membantu Walikota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.